



RENCANA KERJA
KECAMATAN TAMBELANGAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang menyusun Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

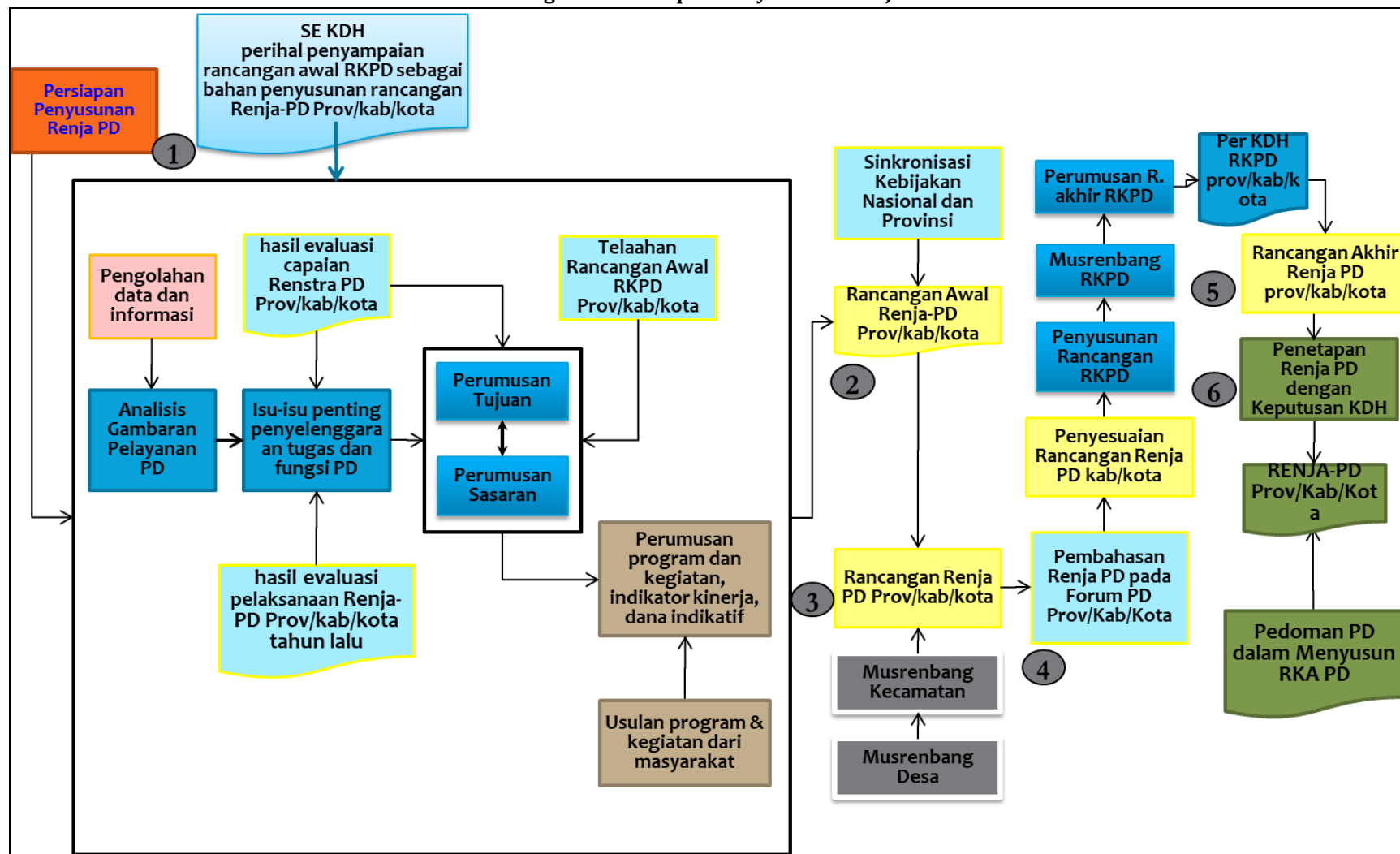
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Kecamatan Tambelangan
 - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
 - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah
-

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
-

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
-

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
-

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
-

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022..

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambelangan Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambelangan Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
-

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keingatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-dua pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Kecamatan Tambelangan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan sebesar Rp. 2.782.056.450,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.459.760.885,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 322.295.565,- . Total terealisasi sebesar Rp. 2.000.417.555,- (71,90%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.720.273.741,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 280.143.814,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)							
1	Gaji dan Tunjangan	2.459.760.885	1.720.273.741	69,94 %	Pembayaran gaji dan tunjangan	14 kali	14 kali	100 %
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							
	Sasaran RPJMD :							

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM	81,00		
	Sasaran Renstra :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kec.				Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	81,00	81,00	100 %
II	BELANJA LANGSUNG (BL)	322.295.565	280.143.814	86,92 %				
I	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	168.790.565	139.317.014	82,54 %	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	80%	79%	98,75 %
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	98.863.400	90.782.864	91,83 %	Jumlah surat terkirim	800 surat	800 surat	100 %
					cakupan pemenuhan kebutuhan listik, air, dan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100 %
					Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	11 unit	7 unit	63,64 %
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat/tamu, kegiatan	1358 Ok	1358 Ok	100 %
					Jumlah tenaga kebersihan	24 Ob	24 Ob	100 %
2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	37.347.165	29.956.150	80,21 %	Jumlah ATK yang tersedia	35 Jenis	35 Jenis	100 %
					Jumlah barang cetakan	6 Jenis	6 Jenis	100 %
					Jumlah barang penggandaan	5427 lmr	5020 lmr	92,50 %
					Jumlah komponen instalasi listrik	8 Jenis	8 Jenis	100 %
					Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	100 %
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	32.580.000	18.578.000	57,02 %	Jumlah koordinasi dalam daerah	156 Ok	101 Ok	67,74 %
					Jumlah koordinasi ke luar daerah	4 Ok	4 Ok	100 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	114.671.000	106.122.600	92,55 %	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	100 %
4	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	25.256.000	24.206.000	95,84 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100 %
5	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	5.615.000	5.195.000	92,52 %	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	100 %

6	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	66.000.000	66.000.000	100%	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit	1 unit	100 %
7	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.800.000	10.721.600	60,23 %	Jumlah pengadaan kelengkapan komputer	18 unit	18 unit	100 %
					Jumlah peralatan Gedung kantor yang dipelihara	22 unit	18 unit	81,8 2 %
					Jumlah meubelair yang dipelihara	20 unit	20 unit	100 %
					Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	22 buah	22 buah	100 %
III	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	8.514.000	8.470.000	99,48 %	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	90 %	90%	100 %
8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	4.174.000	4.150.000	99,43 %	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKjIP	6 dok	6 dok	100 %
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4.340.000	4.320.000	99,54 %	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 Dok	4 Dok	100 %
10	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	-	-	0.00 %	Jumlah Dokumen SKM	0 Dok	0 Dok	0
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	0 Dok	0 Dok	0
IV	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	30.320.000	26.234.200	100 %	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	100 %	100 %
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100 %
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	0	0	0	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	0	0	0
12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	500.000	500.000	100%	Jumlah Satlinmas yang aktif	100 Anggo	100 Anggo	100 %

	terhadap Keamanan Lingkungan					ta	ta	
					Jumlah poskamling yang aktif	10 Desa	10 Desa	100 %
13	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	12.000.000	8.391.200	69,93	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	10 Desa	10 Desa	100 %
					Jumlah desa yang melaksanakan pilkades serentak	0 Desa	0 Desa	0
14	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKP di Kecamatan	15.210.000	15.058.000	99 %	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	1 kali	100 %
					Jumlah musrenbangcam	1 kali	1 kali	100 %
					Jumlah laporan hasil musrenbangcam	1 dok	1 dok	100 %
15	Fasilitasi Administrasi Pelayanan Umum	2.610.000	2.285.000	87,55 %	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	100%	100 %
	JUMLAH BTL + BL	2.782.056.450	2,000.417.555	71,90 %				

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 90 % atau dapat dikategorikan sangat baik.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Kecamatan Tambelangan sampai dengan Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2029-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2029-2024 memuat 4 program dan 15 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tambelangan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tambelangan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1	Nilai IKM	-	82,10					81,00	81,00	100
	Sasaran:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan		1	Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	-	82,10					81,00	81,00	100
4.05.		FUNGSI PENUNJANG LANNYA											
4.05.4.05.14.37		Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	1	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00	100				100	100	100
			2	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100				100	100	100
			3	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	100,00	100				100	100	100

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.37.01.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	pkt	1	1				0	0	100
4.05.4.05.14.37.02.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	1	Jumlah Satlinmas yang aktif	desa	10	10				10	10	100
			2	Jumlah Poskamling yang aktif	desa	10	10				10	10	100
4.05.4.05.14.37.03.		Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	1	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	desa	10	10				10	10	100
			2	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	desa	4	0				0	0	0
4.05.4.05.14.37.04		Fasilitasi administrasi pelayanan umum	1	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	%	100	100				100	100	100
4.05.4.05.14.37.05.		Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1	Jumlah pra musrenbangcam	Kali	1	1				1	1	100
			2	Jumlah musrenbangcam	Kali	1	1				1	1	100
			3	Laporan hasil musrenbang	dok	1	1				1	1	100

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resnra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.01		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	surat	4000	800				800	1600	26,67
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik,dan air	bulan	12	12				12	12	100
			3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	7	7				7	7	100
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	24	24				24	24	100
			5	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	bulan	12	12				12	12	100
			6	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	Ok	6790	1358				1358	2716	40
4.05.4.05.14.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	Jenis	35	35				35	35	100
			2	Jumlah barang cetakan	Jenis	30	6				6	12	40
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	25100	5020				5020	10040	40
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	40	8				8	16	40

Kode Rekening	Tujuan / Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	125	25				25	50	40
4.05.4.05.14.01.03		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	Ok	505	101				101	202	40
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	Ok	20	4				4	8	40
4.05.4.05.14.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100,00				100,00		100	100,00
4.05.4.05.14.02.01.		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.02		Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	2	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.03		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	unit	1	1				1	1	100,00
4.05.4.05.14.02.04		Pengadaan/Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Jumlah pengadaan kelengkapan computer	unit	18	18				18	18	100
			2	Jumlah peralatan Gedung kantor yang dipelihara	unit	90	18				18	36	40
			3	Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	20	20				20	20	100
			4	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	Unit	22	22				22	22	100

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2022-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2020	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resntra
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=7+10+11	(13)=12/6*100
4.05.4.05.14.03		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100,00					100,00	100	100,00
4.05.4.05.14.03.01.		Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	1	Jumlah laporan kemajuan fisik/non fisik	Dok	6	1				1	2	33,33
			2	Jumlah laporan akhir tahun dan CALK	Dok	6	1				1	2	33,33
			3	Jumlah LKJIP	dok	6	1				1	2	33,33
			4	Jumlah laporan SAKIP	Dok	6	1				1	2	33,33
4.05.4.05.14.03.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah dokumen renja	Dok	4	1				1	2	50
			2	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Dok	4	1				1	2	50
			3	Jumlah dokumen renstra	Dok	1	1				1	1	100
4.05.4.05.14.03.04.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah dokumen IKM	Dok	1	1				0	1	100
			2	Jumlah promosi pelayanan public perangkat daerah yang diikuti	kali	12	2				0	2	16,67
			3	Jumlah pelaksanaan HUT kemerdekaan RI	Kali	0	0				0	0	0

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tambelangan sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2020 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena direncanakan perubahan pada SOTK Kecamatan Tambelangan yang baru.
3. Terdapat pengurangan anggaran (refocusing) disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tambelangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambelangan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu				100	100	100	-	95	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu				100	100	100		100	100	100	
3	Jumlah Prioritas Perencanaan Pembangunan Desa Yang Bersifat Partisipatif				20	20	20		20	50	50	
4	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi				100	100	100		100	100	100	

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kecamatan Tambelangan sebagai pelaksana pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.

Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tambelangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
2. SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
3. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

2.5 Faktor – faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambelangan berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambelangan secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan pelaksanaan pelayanan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan di Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN KECAMATAN TAMBELANGAN TAHUN 2021				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
7.01.7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			100 %	
7.01.07.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				
7.01.07.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	5.549.091	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	5.549.091
7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	3.205.417	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	3.205.417
7.01.07.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	3.616.192	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	3.616.192
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	1.038.944	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	1.038.944
7.01.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	17.338.859	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kec. Tambelangan	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	4 dok	17.338.859
7.01.07.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah					Administrasi keuangan perangkat daerah				

7.01.07.01. 2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Tambelan gan	Jumlah ASN	14 Bln	2.533.495.423	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Tambelan gan	Jumlah ASN	14 Bln	2.533.495.423
7.01.07.01. 2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Tambelan gan	Jumlah ATK	30 Jenis	24.311.406	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kec. Tambelan gan	Jumlah ATK	30 Jenis	24.311.406
7.01.07.01. 2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Tambelan gan	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	2.948.548	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Tambelan gan	Jumlah laporan akhir tahun	1 Dok	2.948.548
7.01.07.01. 2.02.07	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Tambelan gan	Jumlah laporan bulananan /triwulan/semester	3 Dok	1.143.374	Koordinasi dan penyusunan lap. Keuangan bulananan /triwulan/semester	Kec. Tambelan gan	Jumlah laporan bulananan /triwulan/semester	3 Dok	1.143.374
7.01.07.01. 2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Tambelan gan			5.960.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Tambelan gan			5.960.000
7.01.07.01. 2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Tambelan gan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	5.960.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. Tambelan gan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	5.960.000
7.01.07.01. 2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Tambelan gan				Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Tambelan gan			
7.01.07.01. 2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tambelan gan	Jumlah komponen listrik	10 Jns	4.469.803	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Tambelan gan	Jumlah komponen listrik	10 Jns	4.469.803
7.01.07.01. 2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tambelan gan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 Jns	13.149.037	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tambelan gan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 Jns	13.149.037
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tambelan gan	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	7 Jns	9.576.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tambelan gan	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	7 Jns	9.576.300

7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Tambelan gan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bln	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kec. Tambelan gan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bln	1.800.000
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tambelan gan	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 0k	4.800.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tambelan gan	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 0k	4.800.000
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambelan gan	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat b) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	a. 360 OK; b. 192 OK; c. 8 OK; d. 720 Liter	42.655.228	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tambelan gan	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat b) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	a. 360 OK; b. 192 OK; c. 8 OK; d. 720 Liter	42.655.228
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelan gan		100%		Pengadaan Daerah Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelan gan		100%	
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tambelan gan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tambelan gan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 unit	66.000.000
7.01.01.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Kec. Tambelan gan	Jumlah Pengadaan Meubilair	25 Unit	17.232.325	Pengadaan Mebel	Kec. Tambelan gan	Jumlah Pengadaan Meubilair	25 Unit	17.232.325
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambelan gan	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	11 unit	99.226.282	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambelan gan	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	11 unit	99.226.282
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelan gan		100 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelan gan		100 %	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambelan gan	Jumlah surat terkirim	800 surat	2.506.294	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tambelan gan	Jumlah surat terkirim	800 surat	2.506.294
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambelan gan	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	12 bln	20.982.468	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tambelan gan	Cakupan pemenuhan kebutuhan air dan listrik	12 bln	20.982.468

7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tambelan gan	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 Ob	33.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tambe langan	c) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 Ob	33.000.000
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambelan gan		100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tambe langan		100%	
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambelan gan	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	20 Unit	4.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tambe langan	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh jasa perizinan	20 Unit	4.200.000
7.01.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Tambelan gan	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	1.600.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Tambe langan	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	1.600.000
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambelan gan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	10.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tambe langan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	16 Unit	10.600.000
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tambelan gan	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	60.058.214	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tambe langan	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	60.058.214
7.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Kec. Tambelan gan			37.492.618	Penataan Organisasi	Kec. Tambe langan			37.492.618
7.01.01.2.1 3.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Tambelan gan	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	37.492.618	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Tambe langan	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	37.492.618
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tambelan gan			2.898.348	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tambe langan			2.898.348

7.01.02.2.0 2.02	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tambelan gan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	100 %	2.898.348	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Tambe langan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat, Jumlah kelompok masyarakat yang berdaya	100 %	2.898.348
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tambelan gan				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tambe langan			
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tambelan gan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	2 Ok	19.483.739	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tambe langan	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	2 Ok	19.483.739
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambelan gan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 desa	40.518.576	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambe langan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	3 desa	40.518.576
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tambelan gan		64 %		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tamb elangan		64 %	
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambelan gan	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskampling yang aktif	10 desa 10 desa	7.100.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambe langan	Jumlah poskamlig yang aktif, jumlah siskampling yang aktif	10 desa 10 desa	34.550.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tambelan gan		64 %		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tamb elangan		64 %	
7.01.06.2.0 1.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tambelan gan	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 desa	1.867.840	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tambe langan	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 desa	1.867.840
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Tambelan gan	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 desa	7.517.840	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Tambe langan	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 desa	7.517.840

7.01.06.2.0 1.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Tambelan gan	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	4 desa	39.303.659	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Kec. Tambe langan	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	4 desa	39.303.659
---------------------	---------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------	-----------	------------	---------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------	-----------	------------

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Kecamatan Tambelangan Tahun 2021.

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Tambelangan Tahun 2021

Perangkat Daerah : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Tambelangan pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada pelaksanaan pelayanan publik secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah **(RKP) Tahun 2022** dengan Tema **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tambelangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tambelangan Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambelangan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Tambelangan pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	Tujuan 1		
	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan ekonomi 2. Indeks gini	3,50 0,261
	Sasaran 1		
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0.722
	Tujuan 2		
	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	62,01
	Sasaran 2.1		
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00
	Sasaran 2.2		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	88,89
	Tujuan 3		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Indeks Toleransi	3,77
	Sasaran 3		
	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	20%

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan, Kecamatan Tambelangan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Tambelangan mendukung pada pencapaian :

- 1 Misi 2 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.**
- 2 Misi 4 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.**

3 Misi 5 yaitu Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2, 4 dan 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa
4. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Adapun program yang mendukung pada sasaran-sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 1 sub kegiatan dan 1 sub kegiatan

Program-program tersebut kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tambelangan Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada table T-C. 33 sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tambelangan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi **SIPD Kabupaten Sampang.**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Tambelangan mengampu Urusan Kewilayahan, Program Kecamatan Tambelangan pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPД Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tambelangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tambelangan Tahun 2022**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			
7.01.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dok	5.549.091
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 dok	3.205.417
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	3.616.192
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPPA SKPD	1 dok	1.038.944
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKjIP dan SAKIP SKPD	5 dok	17.338.859
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	14 Bln	2.533.495.423
7.01.01.2.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ATK	30 Jns	24.311.406
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	2.948.548
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan / triwulan /semester	3 dok	1.143.374
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			5.960.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	1 ASN	5.960.000

7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah			80.919.968
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	10 Jns	8.939.403
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	23 Jns	13.149.037
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a) Jumlah barang cetakan yang disediakan b) Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	7 Jns	9.576.300
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bln	1.800.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu yang disediakan	120 ok	4.800.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat b) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah c) Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	a. 360 OK; b. 192 OK; c. 8 OK; d.720 Liter	42.655.228
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah			96.283.712
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas R4 yang disediakan	1 unit	66,000,000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	11 unit	30.283.712
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			56.488.762
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	800 Surat	2.506.294
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Airdan Listrik	12 bln	20.982.468
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	d) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor e) Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 Ob	33.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			195.988.528
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihaaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinasyang Mendapatkan Jasa Perizinan	20 Unit	4.200.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	1.600.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	13 unit	10.600.000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1 unit	29.510.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	1 unit	150.078.528
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			37.492.618
7.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	a) Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor b) Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 kali 1 dok	37.492.618
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			2.898.348
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	100 %	2.898.348
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			60.002.315
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	2 Ok	19.483.739
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa binaan PKK	3 desa	40.518.576
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.100.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah satlinmas desa yang aktif	10 desa 10 desa	7.100.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		64 %	15.333.920
7.01.06.2.01.	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDES			
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tertib administrasinya	10 Desa	1.867.840
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	10 Desa	7.517.840
7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	4 Desa	5.948.240

Pada Tahun 2022 Kecamatan Tambelangan akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 3,151,115,425,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program , 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Tambelangan dan lingkup Kabupaten Sampang.

4.2 Inovasi Daerah Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Inovasi Kecamatan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis inovasi kecamatan ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya inovasi yang digagas akan dilaksanakan dan dikembangkan pada ;tahun 2022 dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan antara lain :

1. SAJAM SAKTI (Satu Jam Kerja Bakti)

Satu Jam Kerja Bakti (Sajam Sakti) merupakan sebuah kegiatan kerja bakti dilingkungan kantor kecamatan Tambelangan dan dilakukan setiap hari di pagi hari masuk kerja pada jam 07.30 WIB sebelum melakukan pelayanan terhadap masyarakat pegawai kantor kecamatan Tambelangan baik PNS dan tenaga sukarelawan melakukan bersih-bersih terhadap lingkungan tempat kerjanya dan dipimpin langsung oleh bapak camat Tambelangan. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap pengguna pelayanan yaitu masyarakat agar tetap merasa nyaman dan bersih saat melakukan kegiatan pelayanan public, karena motto dari kantor kecamatan Tambelangan itu sendiri adalah masyarakat senang pegawai pun senang.

Kecamatan Tambelangan memiliki kantor di wilayah lingkup kecamatan Tambelangan yang berada di desa Samaran Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Kantor kecamatan Tambelangan menjadi contoh untuk masyarakat agar menjaga kebersihan baik dilingkup kantor dan ditengah masyarakat karena kebersihan adalah wujud menjaga Kesehatan bagi masyarakat. Dan kegiatan melakukan satu jam kerja bakti ini dilakukan tidak hanya untuk menjadi contoh bagi masyarakat namun juga memebrikan kenyamanan tempat dan kenyamanan pelayanan . terobosan yang dilakukan merupakan peningkatan kinerja aparat kecamatan dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penjagaan kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga berhasil dilakukan dengan baik dikantor kecamatan

Tambelangan sehingga kecamatan Tambelangan memperoleh penghargaan sebagai kantor kecamatan terbersih nomor 2 se kabupaten Sampang.

2. MAT TAMBEDES (Bergerak Bersama Desa Menuju Sampang Hebat Bermartabat)

Kecamatan Tambelangan memiliki 10 desa yang meliputi : Desa Birem, Desa Bringin, Desa Tambelangan, Desa Sumber, Desa Karanganyar, Desa Batorasang, Desa Mambuluh Barat, Desa Barunggagah, Desa Banjarbillah dan Desa Samaran. Sepuluh desa ini membutuhkan pelayanan administrasi di kecamatan Tambelangan diantaranya : pelayanan pengantar SKCK, perekaman KTP, dan KK serta pelayanan administrative lainnya.

Sepuluh desa ini juga memerlukan peningkatan kinerja pemerintahan desanya dengan bergerak Bersama meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan administrative tersebut dibutuhkan perangkat dan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik, responsive, penuh dedikasi dan ramah terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrative

Kecamatan Tambelangan berusaha memenuhi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat tersebut dengan membenahi berbagai sector yang menunjang hal tersebut. Diantaranya dengan Bersama stakeholder terkait mampu bergerak Bersama desa untuk meningkatkan kinerja kecamatan dan desa secara periodic sebulan sekali. Rangkaian bergerak Bersama des aini dimulai dengan apel Bersama aparat desa, aparat kecamatan dan dilanjutkan dengan pembinaan administrasi desa oleh aparat kecamatan.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan public
3. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Hasil evaluasi atas Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 99,94% atau dapat dikategorikan sangat baik.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tambelangan Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambelangan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024. Adapun sasaran Kecamatan Tambelangan adalah :

1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
4. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

Pada tahun 2022 Kecamatan Tambelangan akan melaksanakan Urusan Kewilayahan dengan total anggaran sebesar Rp. 3,151,115,425,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **5 program dan 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kecamatan Tambelangan dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Sampang, Agustus 2021

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAJDI